

LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 SEBAGAI UPAYA DALAM MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

CULTURAL AND CIVIC LITERACY IN THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 ERA TO STRENGTHEN RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA

Mahmudi^{1a}, Nasrullah^{2b}

¹*Dosen IAI Al-Aziziyah Samalanga Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh*

²*Dosen IAIN Lhokseumawe Propinsi Aceh*

^a*E-mail: mahmudi@iaialaziziyah.ac.id*

^b*E-mail: nasrullahyahya31@gmail.com*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan jawaban tentang peran literasi dan kewargaan pada era revolusi industri 4.0 dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia. Artikel ini hasil penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman agama di Indonesia harus dipadukan untuk menciptakan suatu keindahan. Literasi budaya dan kewargaan pada era revolusi industri 4.0 merupakan batu loncatan menuju moderasi beragama. Islam memerintahkan untuk diterapkan sikap moderasi beragama dengan prinsip keadilan, keseimbangan dan toleransi dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan sikap moderasi beragama yang lahir dari literasi budaya dan kewargaan, akan tertanam persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia.

Kata Kunci: literasi; moderasi beragama; revolusi industri 4.0

ABSTRACT

This article aims to provide answers about the role of literacy and citizenship in the industrial revolution 4.0 era to strengthen religious moderation in Indonesia. This research is qualitative with a descriptive nature and normative-sociological approach. Library research by using content analysis method is also applied. The results conclude that religious diversity in Indonesia must be combined to create a beauty. In combining these differences, precise steps are required. Cultural literacy and citizenship in the industrial revolution 4.0 era are steppingstones towards a surefire step which is the main concept, religious moderation. Islam commands to apply an attitude of religious moderation with the principles of justice, balance and tolerance with established boundaries. By applying religious moderation's attitude born from cultural literacy and citizenship, unity between Indonesian citizens will be embedded, for their national identity.

Keywords: literacy; religious moderation; Industrial Revolution 4.0

DOI : 10.38075/tp.v16i1.234



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hidup di dunia ini adalah ujian. Menghadapi ujian tentu saja butuh perjuangan. Dalam berjuang, tidak pernah luput dari berbagai macam rintangan dan tantangan yang selalu datang silih berganti. Tidak semua orang lulus dalam mengikuti ujian. Syarat utama untuk lulus mengikuti ujian adalah dengan cara memahami karakteristik dari ujian tersebut. Untuk itu, diperlukan sebuah buku pedoman yang mengulas tuntas karakteristik ujian dan kiat-kiat yang diperlukan agar lulus dalam mengikuti ujian.

Agama merupakan *manual book* (buku panduan) dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan di dunia, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Hidup tanpa mengikuti arahan agama akan terjerumus ke jalan yang sesat dan mengalami benturan dari berbagai arah. Perumpamaannya, bagaikan pengemudi yang menerobos lampu merah, tidak menutup kemungkinan ia akan menabrak atau ditabrak oleh pengemudi lain.

Agama memberikan arahan kepada pemeluknya dalam berbagai aspek kehidupan. Mengikuti arahan agama dapat menghindari terjadinya benturan, sebagaimana perumpamaan mengikuti aturan rambu-rambu lalu lintas dapat menghindari terjadinya kecelakaan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang di dalamnya terdapat banyak agama. Tepatnya, ada enam agama yang diakui di negara Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Khatolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Secara garis besar, semua agama tersebut merupakan panduan untuk penganutnya masing-masing, walaupun penganut suatu agama hanya

meyakini bahwa agama yang dianutnyalah yang merupakan agama yang benar. Warga negara Indonesia bebas memeluk agama apa saja. Secara mayoritas, penduduk negara Indonesia menganut agama Islam.

Islam hadir dengan tujuan utama untuk menyebarkan kasih sayang antar sesama makhluk dengan diutusnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang yang dibawa oleh beliau tidak hanya antar pemeluk agama Islam saja, akan tetapi juga dengan pemeluk agama lain. Juga tidak hanya kasih sayang antar sesama manusia, akan tetapi kasih sayang yang disebar oleh Islam bersifat universal, mencakup semua makhluk. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam kitab suci Alquran, yang artinya: *“Dan tidak Kami utuskan kamu (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam”*. (QS. Al-Anbiya' [33]; 107).

Berkaitan dengan tujuan utama tersebut, langkah utama yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW adalah memperbaiki akhlak manusia. Dalam menyampaikan risalah dari Allah SWT, Nabi Muhammad SAW mengawalinya dengan memperbaiki tingkah laku manusia. Hal itu dia lakukan tidak hanya waktu dia menerima wahyu pertama dari Allah SWT, melainkan jauh sebelum wahyu pertama diturunkan. Proses perbaikan akhlak manusia sudah mulai dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak dia masih kanak-kanak. Walaupun tidak secara lisan, namun semua gerak-gerik dan tingkah lakunya mulai masa kanak-kanak, remaja, pemuda sampai dia wafat merupakan contoh akhlak yang digambarkan oleh Allah SWT dalam kitab suci Alquran. Inilah makna dari

pernyataan beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, yang artinya: *“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”*. (HR. Al-Baihaqi).

Penyempurnaan kemuliaan akhlak menjadi kunci utama dalam menciptakan rasa kasih sayang antar sesama. Mengapa demikian? Karena dengan adanya akhlak yang mulia dalam lubuk hati setiap manusia, akan terwujud akhlak yang mulia tersebut dalam tindakannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Sikap saling menghormati dan saling menyayangi merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Ketika sikap tersebut telah terimplementasikan dalam kehidupan manusia, maka saat itulah akan terasa bahwa Islam merupakan rahmat bagi sekalian alam.

Akhir-akhir ini, agama sering dilibatkan dengan aksi-aksi kekerasan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Berbagai aksi terorisme dan ekstrimisme sering dilibatkan agama oleh pelaku aksi-aksi tersebut. Bahkan, yang sangat disayangkan, agama Islam merupakan agama yang paling sering dikambinghitamkan dalam aksi-aksi kekerasan tersebut, sehingga permasalahan terorisme, Islam dan psikologi selalu menjadi bahan perbincangan, khususnya di kalangan akademisi. Hal itu tentu saja menyebabkan dampak negatif terhadap Islam. Islam dianggap sebagai agama yang keras, kejam dan identik dengan perang. Anggapan-anggapan tersebut menyebabkan orang-orang yang tidak mengenal Islam dengan sepenuhnya akan menjauh dari Islam. Timbul berbagai macam prasangka terhadap Islam. Islam dan penganutnya (Muslim)

menjadi agama dan penganut agama yang didiskriminasi, ditakuti dan dibenci oleh penganut agama lain. Itulah yang dikenal dengan istilah Islamofobia.

Fenomena tersebut merupakan hal yang bertolak belakang dengan hakikat Islam. Islam sabagai agama *rahmatan lil ‘alamin* pada hakikatnya sama sekali tidak bersentuhan dengan kekerasan. Islam bukanlah agama perang. Memang dalam Islam ada istilah ‘jihad’. Namun perlu dipahami bahwa jihad bukanlah aksi kekerasan yang tidak ada aturan. Jihad dalam Islam dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak serta merta melancarkan serangan kepada kaum non muslim tanpa sebab apapun. Islam melarang penganutnya mencaci penganut agama lain, apalagi sampai melukai mereka dengan aksi-aksi kekerasan.

Adapun aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya Muslim, pada hakikatnya mereka menjalankan aksi tersebut bukan atas dasar ajaran Islam. Mereka adalah orang-orang yang keliru dalam memahami ajaran Islam. Islam yang sesungguhnya tidaklah mengajarkan apa yang mereka kerjakan.

Aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan Islam, pada era ini semakin heboh diberitakan di berbagai media. Didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin meningkat, aksi kekerasan semakin cepat terpamerkan ke berbagai belahan dunia sehingga sangat mudah ditonton oleh berbagai kalangan manusia. Dalam hal ini, kehadiran era industri 4.0 menjadi tantangan bagi Islam dalam memperkenalkan jati dirinya kepada

segenap manusia yang belum mengenal Islam dengan sepenuhnya.

Fenomena tersebut merupakan PR (Pekerjaan Rumah) besar bagi umat Islam. Umat Islam harus bisa melepaskan diri dari keterlibatan dengan aksi-aksi kekerasan oleh orang-orang yang keliru dalam memaknai Islam. Umat Islam harus bisa melepaskan label terorisme yang menjadi belenggu pada pundak-pundak mereka. Umat Islam harus keluar dari tuduhan keterlibatan mereka dalam aksi-aksi kekerasan. Umat Islam harus mampu membangun budaya literasi, agar misi utama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* bisa terlaksanakan.

Untuk menyelesaikan PR tersebut, ada dua langkah yang harus ditempuh oleh umat Islam. Pertama, umat Islam harus benar-benar memahami esensi dari Islam. Islam jangan hanya menjadi agama keturunan, walaupun menganut agama Islam oleh seseorang yang terlahir dari orang tua yang beragama Islam memang terjadi secara otomatis. Umat Islam harus mempelajari Islam untuk membuktikan Islam sebagai satu-satunya agama yang diyakini kebenarannya. Umat Islam memang tidak perlu mencari kesalahan agama lain, tapi setidaknya umat Islam harus mengetahui, meyakini dan membuktikan kebenaran agamanya sendiri.

Kedua, umat Islam harus mampu hidup berdampingan dengan penaglut agama lain. Hidup damai saat berbaur dengan penganut agama lain, namun tidak dengan mencampur-adukkan ajaran agamanya dengan ajaran agama lain. Artinya, umat Islam harus mampu menerapkan konsep toleransi dalam

beragama yang diajarkan oleh Alquran, yaitu: *"Bagimu agmamu, dan bagiku agamaku"*. (QS. Al-Kafirun [109]; 6).

Menyikapi langkah yang kedua di atas, dalam Islam dikenal istilah *'washathiyah'* (moderat). Umat Islam harus mampu menerapkan konsep *'moderasi beragama'* dalam kehidupannya, khususnya dalam lingkungan sosial. Moderasi beragama semakin diperlukan dengan lahirnya era revolusi industri 4.0 yang menawarkan berbagai kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk dalam penyebaran berita melalui berbagai media. Tanpa menerapkan konsep moderasi beragama, kita akan mudah termakan oleh berita-berita yang provokatif, sehingga dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama.

Beranjak dari latar belakang di atas, penulis tertarik menguraikan lebih mendetail pembahasan tentang *Literasi Budaya dan Kewargaan pada Era Revolusi Industri 4.0 sebagai Upaya dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia*. Dalam artikel ini, penulis membahas tentang peran literasi budaya dan kewargaan dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia dan menguatkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia sebagai negara yang lahir dari perbedaan. Artikel ini juga diharapkan agar mampu memberikan jawaban bagi umat Islam bagaimana cara membuktikan agama Islam sebagai agama yang menjadi *rahmatan lil 'alamin*.

METODE

Dalam mengumpulkan data-data dan informasi-informasi yang relevan dengan masalah atau topik yang akan

dibahas dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), di mana penulis melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal, literatur klasik serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, guna mendapatkan data yang akurat. Penelitian ini bersifat normatif-sosiologis. Peneliti menjadikan landasan-landasan hukum dan aspek-aspek sosial sebagai barometer dalam melakukan penelitian. Untuk mendapatkan karakteristik yang jelas dari masalah yang dikaji, penulis juga menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi (ditiru) dan datanya valid, dengan tetap memerhatikan konteksnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Budaya dan Kewargaan pada Era Revolusi Industri 4.0

Literasi Budaya dan Kewargaan

Literasi budaya merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial adalah salah satu bentuk kehidupan yang secara otomatis dilalui oleh setiap orang, di samping dia menjalani kehidupan individualnya. Oleh karena itu, menjalani kehidupan tanpa mengindahkan literasi budaya sama dengan menjalani kehidupan yang pincang dan tidak akan mendapatkan ketentraman. Literasi budaya mempunyai kaitan erat dengan literasi kewargaan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang kokoh dalam membangun persatuan bangsa di Indonesia. Bahkan, sebagai bagian dari

dunia, warga negara Indonesia juga perlu memahami dan mengimplementasikan keduanya sebagai bekal dalam melibatkan diri dalam kancah perubahan dan perkembangan global.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2017 menyatakan bahwa, literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa (Firman, Ratna Djumal, dkk., 2017).

Literasi budaya dan kewargaan sangat penting diterapkan. Negara yang majemuk dan multikultural tidak akan mampu dikelola dan dilestarikan ketentramannya oleh masyarakat yang mempunyai beragam perbedaan tanpa didasari dengan pendidikan budaya dan kewargaan yang maksimal. Untuk itu, perlu juga prinsip-prinsip dasar serta unsur-unsur yang penting dalam memaksimalkan literasi budaya dan kewargaan.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan enam prinsip dasar dalam pembentukan literasi kebudayaan dan kewargaan, sebagaimana uraian di bawah ini.

Pertama, budaya sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku, yang berarti bahwa budaya menjadi jiwa dalam bahasa dan perilaku yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Kedua, kesenian sebagai produk

Tatar Pasundan

Jurnal Diklat Keagamaan

pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866

Volume 16 Nomor 1 Tahun 2022

Negara yang harus diperkenalkan kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka tidak tercabut dari akar budayanya dan kehilangan identitas kebangsaannya. Ketiga, kewargaan multikultural dan partisipatif. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Dengan kondisi seperti ini, dibutuhkan suatu masyarakat yang mampu berempati, bertoleransi, dan bekerja sama dalam keberagaman. Keempat, nasionalisme, yaitu kesadaran akan kebangsaan yang merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan kecintaan terhadap bangsa dan negaranya, setiap individu akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi martabat bangsa dan negaranya. Kelima, inklusivitas, yang sangat berperan di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Terbangunnya sikap inklusif akan mendorong setiap anggota masyarakat untuk mencari keuniversalan dari budaya baru yang dikenalnya untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Keenam, pengalaman langsung, yang mempunyai arti yang besar dalam membangun kesadaran sebagai warga Negara serta membentuk ekosistem yang saling menghargai dan memahami (Firman, Ratna Djumal, dkk., 2017).

Menurut Suastika dan Sukadi, sebagaimana dikutip oleh Anggi Pratiwi dan Eflinnida Nurul Komaril Asyarotin, ada enam unsur pendidikan budaya dan kewargaan, yaitu: identitas nasional, kebangsaan dan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi dan masyarakat madani Indonesia,

wawasan nusantara serta hak azasi manusia. Demikian pula sebagaimana yang disampaikan Halim dalam hasil penelitiannya bahwa pemahaman terhadap budaya lokal dapat memperkuat nilai keagamaan dan kewargaan (Halim, 2020)

Identitas nasional merupakan pengetahuan dalam menghayati Pancasila sebagai lambang negara. Kebangsaan dan kewarganegaraan merupakan pembelajaran akan hakikat bangsa Indonesia (Bhineka Tunggal Ika) dan kritis dalam perwujudan pemersatu dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hak dan kewajiban warga negara, merupakan pelaksanaan prinsip hubungan warga negara dan pemerintah negara. Demokrasi dan masyarakat madani Indonesia merupakan penalaran konsep nilai kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat. Wawasan nusantara merupakan penghayatan nilai konsep sumber daya milik nusantara dalam kehidupan sosial. Hak azasi manusia (HAM) merupakan kemampuan memahami esensi, pelanggaran, pengadilan dan perkembangan pemikiran tentang HAM. Selain dari enam unsur tersebut, ada satu unsur yang juga dianggap penting dalam pendidikan budaya dan kewargaan, yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah menghayati dan menjunjung nilai perwujudan ketahanan negara dari ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar (Anggi Pratiwi, 2019).

Pendidikan budaya dan kewargaan yang maksimal adalah pendidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip dan unsur-unsur yang disebutkan di atas. Prinsip-prinsip dan

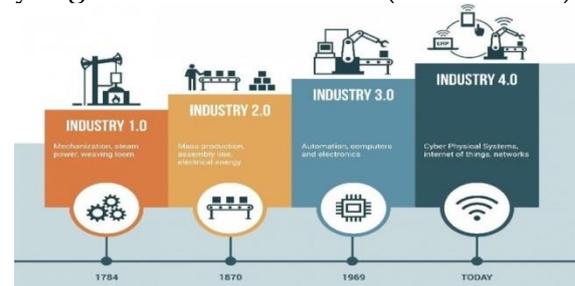
unsur-unsur yang disebutkan di atas adalah hakikat dari literasi budaya dan kewargaan. Jika prinsip-prinsip dan unsur-unsur di atas belum diterapkan dengan maksimal dalam literasi budaya dan kewargaan, maka output dari pendidikan tersebut juga tidak akan maksimal.

Era Revolusi Industri 4.0

Istilah 'revolusi industri' pertama sekali diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19 (Mutiarawati Fajariah, Djoko Suryo, 2020) (Fonna, 2019). Era revolusi industri 4.0 merupakan sebuah era baru setelah berakhirnya era 3.0. Era baru ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Dalam bukunya yang berjudul *The Fourth Industrial Revolution*, sebagaimana dikutip dalam Jurnal Sndermann, beliau mengatakan bahwa, revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah cara kita hidup, bekerja dan berhubungan satu dengan yang lainnya (Lase, 2019).

Klaus Schwab menyebutkan periode berlangsungnya empat tahap revolusi industri, yaitu: *Pertama*, revolusi industri 1.0, berlangsung pada abad ke-18 sampai abad ke-19, tepatnya dari tahun 1760-an sampai 1840-an. Periode ini dipicu oleh pembangunan jalur kereta api dan penemuan mesin uap, yang membawa pada era produksi mekanis. Periode ini ditandai dengan penemuan alat tenun mekanis pada tahun 1784. *Kedua*, revolusi industri 2.0, terjadi pada akhir ke-19 hingga akhir abad ke-20, ditandai dengan pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. *Ketiga*, revolusi industri 3.0, terjadi pada penghujung abad ke-20, tepatnya pada

tahun 1970 yang ditandai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi dalam hal otomatisasi produksi (Farah Diena, Andi Tarigan, 2019). *Keempat*, revolusi industri 4.0, terjadi pada awal abad ke-21, tepatnya pada tahun 2018. Revolusi ini ditandai dengan terjadinya penggabungan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama *Internet of Things (IoT)*. Lebih jelasnya, uraian di atas merupakan penjabaran terhadap sebuah gambar tentang sejarah revolusi industri yang juga dikutip oleh Stevani Halim dalam artikelnya, sebagaimana yang terlihat di bawah ini (Halim, 2018).



Gambar 1. Sejarah Revolusi Industri

Dilihat dari deskripsinya, memang benar bahwa era revolusi industri 4.0 merupakan era yang dapat mengubah cara hidup, bekerja dan melakukan interaksi sosial, sebagaimana yang diungkapkan oleh Profesor Klaus. Dalam hal ini, timbul satu pertanyaan, ke arah manakah perubahan tersebut terjadi, ke arah positif atau negatif?

Kodrat manusia tentu menginginkan bahwa perubahan yang terjadi selalu menuju ke arah positif. Namun, pada dasarnya dua arah perubahan tersebut mempunyai potensi yang sama. Komitmen masyarakat yang

hidup di era baru inilah yang bisa mengambil sikap tegas agar perubahan ke arah negatif tidak terjadi. Adanya komitmen yang kuat untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik menjadi modal untuk mewujudkan keinginan.

Namun demikian, modal komitmen saja sama sekali tidak cukup. Untuk itu, diperlukan perhatian yang kuat dari setiap orang yang mempunyai tanggung jawab dalam menghadapi era baru ini, agar setiap orang yang berada di bawah tanggung jawabnya tidak terjerumus ke dalam perubahan yang negatif. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab terhadap orang yang dipimpinya. Seorang direktur mempunyai tanggung jawab terhadap karyawannya. Seorang guru mempunyai tanggung jawab terhadap anak didiknya. Seorang kepala keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Bahkan, setiap orang mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan dirinya sendiri.

Pendidikan literasi budaya dan kewargaan pada era revolusi industri 4.0 menjadi sangat penting dalam membentuk hubungan sosial yang baik di era baru ini. Hal itu disebabkan oleh karakteristik budaya dan kewargaan, sebagaimana uraian di atas, yang sangat dekat dengan kepribadian seseorang. Pada hakikatnya, budaya dan kewargaan adalah jati diri seseorang sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, tanpa literasi budaya dan kewargaan, mustahil interaksi sosial akan terjalin dengan baik dalam tantangan zaman yang sarat akan perubahan dan perkembangan. Pada era ini, manusia dituntut untuk benar-benar memahami perubahan dan perkembangan yang terjadi, karena mau tidak mau setiap

manusia sudah terjun dalam perubahan tersebut secara otomatis. Di samping itu, manusia juga tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip budaya dan kewargaan, sebagai jati diri seseorang dalam lingkungan sosial. Manusia dituntut untuk bisa memanfaatkan perubahan dan perkembangan zaman, agar ia tidak dimanfaatkan oleh perubahan dan perkembangan itu sendiri.

Moderasi Beragama di Indonesia

Sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang, Islam hadir dengan sikap yang penuh toleransi. Islam mengakui adanya keberagaman, namun keberagaman tersebut tidak dijadikan oleh Islam sebagai sudut pandang dalam melihat perbedaan. Dalam Islam, keberagaman merupakan fitrah dan sudah merupakan suatu anugerah. Keberagaman dititikberatkan sebagai media dalam melakukan perpaduan untuk mewujudkan suatu kesempurnaan. Keberagaman juga tidak menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, melainkan tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah SWT sebagai Pencipta keberagaman tersebutlah yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi-Nya.

Sebagaimana Allah SWT menegaskan dalam kitab suci Alquran yang artinya: *“Wahai para manusia, sesungguhnya Kami menciptakanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”*. (QS. Al-Hujurat [49]; 13).

Ayat di atas berbicara tentang keberagaman antar suku dalam agama

Islam. Bagaimana dengan keberagaman antar agama sebagaimana yang dianut oleh warga Negara Indonesia? Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah SWT juga tidak mengesampingkan perbedaan antar agama. Islam tidak pernah mencela apalagi menyakiti penganut agama lain, sejauh penganut agama lain tersebut tidak mengganggu Islam.

Moderasi merupakan pengertian umum dari satu istilah dalam bahasa Arab, yaitu *al-wasathiyah* (Fauzi, 2018). Moderasi beragama merupakan salah satu konsep saling menghargai dalam Islam. Moderasi beragama dalam Islam dikenal dengan istilah *Wasathiyah al-Islamiyyah* dalam bahasa Arab. Adapun dalam bahasa Inggris, moderasi beragama dalam Islam dikenal dengan istilah *Islamic Moderation*. Moderasi dalam Islam merupakan satu sikap yang selalu berusaha untuk berada di posisi tengah dari dua sikap yang saling bertolakbelakang dan berlebihan sehingga salah satu dari dua sikap tersebut tidak tumbuh menjadi mindset dalam pikiran seseorang (Siregar, 2020).

Landasan utama sikap moderasi beragama dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya: *“dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”*(QS. Al-Baqarah [2]: 143).

Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan dua hal. Pertama, Islam adalah agama yang *wasath* (pertengahan) tidak berlenihan, juga tidak kurang. Kedua, umat Islam adalah umat umat yang pertengahan, adil dan

terpilih, tidak berlebihan dan tidak kurang. Hal ini sebagaimana pernyataan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang artinya: *“Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya.”* Umat Nabi Muhammad menjadi saksi di hari kiamat bagi umat-umat Nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW menjadi saksi bagi umatnya (Al-Zuhaili, 2001).

Berada di posisi tengah dalam konteks keagamaan bukan berarti membuka ruang seleber-lebarnya untuk dikompromikan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Lukanul Hakim Saifuddin dalam menyampaikan prolognya dalam sebuah buku yang berjudul *Moderasi Beragama* (Kementrian Agama RI, 2019). Akan tetapi, berada di posisi tengah tidak ubahnya bagaikan wasit dalam sebuah pertandingan yang selalu berusaha untuk menciptakan kedamaian antara kedua belah pihak yang sedang memperjuangkan kemenangan dengan tidak bersikap memihak kepada salah satu dari keduanya.

Untuk itu, umat Islam harus benar-benar memahami esensi dan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam Islam. Abd. Amri Siregar dalam buku yang berjudul *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia* menyebutkan tiga prinsip moderasi dalam Islam, sebagaimana uraian berikut.

Pertama, keadilan (*adalah*), yaitu bersikap menengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Alquran dan berbuat kebaikan. Adil bermakna mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Dalam dua hal yang kontradiktif, bersikap adil adalah tidak memihak dan tetap berkomitmen dalam

mempertahankan kebenaran. *Kedua*, keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan yang kompleks, yang mencakup segi keyakinan maupun praktik, bersifat materi ataupun abstrak. Dalam lingkup Islam, keseimbangan juga harus diwujudkan antara dalil *a'qli* (dalil yang berseumber dari akal pikiran rasional) dan dalil *naqli* (dalil yang bersumber dari Alquran dan hadis) dalam kajian teologi. Maksudnya, dalam memahami teori tentang ketuhanan tidak boleh hanya mengedepankan salah satu dari dua jenis dalil tersebut, akan tetapi, keduanya harus berjalan secara serentak. Namun demikian, seandainya terdapat kontradiksi antara keduanya, maka dalil *naqli* harus diprioritaskan. Dalam kehidupan pribadi, keseimbangan harus diwujudkan anatara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban dan lain sebagainya. Keseimbangan juga merupakan sikap tidak berlebihan dan tidak kurang, serta tidak ekstrim dan tidak liberal. *Ketiga*, toleransi (*tasamuh*). Kata toleransi merupakan kata yang mempunyai makna sangat sensitif. Kesalahan dalam memahami esensi dari kata toleransi tidak akan menciptakan demokrasi, akan tetapi justru menyebabkan kehancuran bagi negeri ini. Islam memandang penting sikap toleransi. Tidak hanya antar sesama Muslim, dengan non Muslim pun diperintahkan untuk bersikap toleransi. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa, Islam merupakan ajaran yang total. Semua aturan telah final dalam Islam, termasuk dalam hal bersikap toleransi, terutama dengan penganut agama lain. Toleransi jangan sampai menjadi benteng bagi minoritas non Muslim di

kalangan mayoritas Muslim, sementara minoritas Muslim terus dijadikan bahan permainan di kalangan mayoritas non Muslim (Siregar, 2020).

Tiga prinsip di atas dengan batasan-batasannya masing-masing merupakan pilar moderasi beragama dalam Islam. Dengan demikian, moderasi beragama dalam Islam tidak akan berjalan pada porosnya jika tidak diaplikasikan ketiga prinsip di atas.

Selain dari tiga prinsip di atas, moderasi beragama juga dapat ditunjukkan melalui sikap lurus dan tegas (*I'tidal*), egaliter (*musawah*), musyawarah (*syura*), reformasi (*ishlah*), mendahulukan yang prioritas (*aulawiyah*) serta dinamis dan inovatif (*tathawwur wa ibtikar*) (Mohamad Fahri, Ahmad Zainuri, 2020).

Mengimplementasikan sikap moderasi beragama dalam Islam adalah dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moderasi yang tersebut di atas. Prinsip-prinsip tersebut menuntun seseorang untuk bersikap tegas dalam menyatakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah tetap salah. Prinsip-prinsip tersebut tidak akan membuka ruang untuk berkonpromi dalam masalah keyakinan, melainkan keomitmen dalam kebenaran. Itulah hakikat moderasi beragama dalam Islam.

Literasi Budaya dan Kewargaan untuk Memperkuat Moderasi Beragama

Indonesia merupakan negara yang majemuk dalam segala bidang. Indonesia merupakan negara yang kaya bahasa, etnis, suku bangsa, budaya dan agama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah suku dan sub suku di Indonesia mencapai 1340. Bahasa sehari-hari warga

negara Indonesia secara garis besar dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Daerah dan bahasa Asing. Sementara jumlah bahasa Daerah mencapai sekitar 2.500 jenis bahasa. Jumlah agama di Indonesia adalah 6 (enam) jenis agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah dan satu agama/kepercayaan lainnya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghuchu dan lainnya (Akhsan Na'im, Hendry Saputra, 2011).

Pada tahun 2013, BPS bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) mengklarifikasikan jumlah tersebut menjadi 633 kelompok suku-suku besar, sebagaimana yang dituturkan oleh Lukman Hakim dalam buku yang berjudul *Moderasi Beragama* (Kementrian Agama RI, 2019). Walaupun dilihat dari hasil klarifikasi tersebut, namun jumlah suku di Indonesia masih terbilang banyak.

Berdasarkan data di atas, selain kaya bangsa dan bahasa, Indonesia juga termasuk negara yang kaya agama. Enam agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, ditambah satu kepercayaan lainnya ada di Indonesia. Oleh karena itu, kerukunan antar agama di Indonesia juga sangat perlu diwujudkan, demi terjaga dan terlestarikan perdamaian dan persatuan bangsa.

Keberagaman agama di Indonesia tidak menjadi satu kendala bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Indonesia lahir dari perbedaan tersebut. Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang heterogen (berbeda-beda) senantiasa menampung dan menaungi keberagaman agama yang ada di dalamnya. Indonesia juga memberikan kebebasan kepada seluruh

rakyatnya dalam memilih agama untuk dianutnya.

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dari penjajahan Belanda dan Jepang tidak hanya kemerdekaan secara simbolis untuk berdiri tegak sebagai sebuah negara. Seiring dengan kemerdekaan tersebut, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjamin kemerdekaan dan kebebasan bagi tiap-tiap warganya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Sebagaimana bunyi pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang Undang Dasar (UUD) 1945:

Ayat 1: "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Ayat 2 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Menindaklanjuti pemberian jaminan terhadap kerukunan dalam perbedaan dalam hal agama dan kepercayaan tersebut, Indonesia juga tidak boleh lengah dalam memantau dan menciptakan upaya-upaya untuk terpeliharanya kerukunan. Tidak hanya menciptakan, Indonesia juga harus senantiasa memperbaharui upaya-upaya tersebut dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman.

Sekarang ini, kita berada di era revolusi industri 4.0. Era ini identik juga dengan era disrupsi, di mana manusia ditawarkan dengan berbagai kemudahan dalam segala bidang. Kemudahan merupakan suatu upaya mendapatkan hasil dengan proses yang tidak begitu panjang (instan). Hasil yang didapatkan dengan cara yang instan belum tentu semuanya tepat

sasaran. Sebagaimana makanan yang disajikan dengan cara yang instan tidak selamanya bisa menjamin kesehatan.

Indonesia harus menciptakan filter untuk memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar dari hasil yang diperoleh dengan cara instan tersebut. Selain berakibat fatal bagi pribadi seseorang, kesalahan dalam memilih demi mendapatkan sesuatu dengan yang mudah bisa menjadi benih perpecahan di antara masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga kerukunan dalam perbedaan antar warga Negara dengan melakukan upaya edukasi terhadap generasi muda. Salah satu upaya yang perlu diberlakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membuat peningkatan terhadap pendidikan literasi budaya dan kewargaan.

Hidup di era revolusi industri 4.0 sangat mudah tertipu dengan berbagai berita yang beredar dengan begitu cepat. Hal itu menyebabkan terjadinya disinformasi di kalangan masyarakat sehingga bisa berujung kepada perpecahan. Untuk itu, masyarakat sangat dituntut agar benar-benar memahami perbedaan dan mengakui identitas nasional sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah hidup lama dalam perbedaan. Identitas nasional yang dipahami lewat literasi budaya dan kewargaan menjadi wadah pemersatu dalam perbedaan. Apapun aspek perbedaan seseorang dengan orang lain tidak akan terlihat dalam kehidupan sosial, jika prinsip nasionalisme yang dikedepankan.

Pada dasarnya, literasi budaya dan kewargaan bukanlah kunci utama dalam menciptakan kerukunan antar

warga. Literasi budaya dan kewargaan merupakan langkah awal untuk menciptakan sikap moderasi beragama. Moderasi beragamalah yang menjadi konsep utama dalam menciptakan kerukunan tersebut.

Moderasi beragama merupakan langkah jitu dalam menciptakan dan melestarikan kerukunan dalam perbedaan. Namun, moderasi beragama tetap harus selalu berpijak pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan. Moderasi memang bersikap berada di tengah-tengah, tidak memihak. Akan tetapi, ia bukan berarti memberikan peluang yang besar untuk mengkompromikan masalah agama dan kepercayaan. Islam mempunyai dasar-dasar yang sudah final, bersifat absolut, tidak bisa diotak-atik. Menyikapi perbedaan (baik perbedaan antar aliran dalam Islam, maupun perbedaan antara Islam dengan agama lain yang ada di Indonesia) dilakukan dengan bersikap toleransi (*tasamuh*).

Toleransi dalam prinsip moderasi beragama dalam Islam adalah dengan tidak mengesampingkan dasar-dasar yang sudah final dan bersifat absolut. Toleransi juga tidak dengan menerima mentah-mentah pendapat orang lain yang kontradiksi dengan pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya. Toleransi dalam prinsip moderasi beragama dalam Islam adalah dengan memberikan kesempatan untuk berkompromi pada masalah-masalah yang belum bersifat final dalam agama. Begitu juga masalah-masalah yang baru muncul (*mas'alah haditsah*) sebagai reaksi dari pengaruh perkembangan zaman, yang belum ada ketentuannya dalam agama.

Adapun dalam hal-hal yang bersifat final, agama Islam tidak membolehkan umatnya melakukan kompromi. Di balik itu, Islam juga tidak membolehkan terjadinya klaim-klaim yang keluar dari batasan Islam antara sesama, terhadap orang yang tidak sepaham, selama ia tidak keluar dari garis ketauhidan.

Secara garis besar, Islam tidak membolehkan berkompromi dalam masalah teologi (*ushuluddin*), baik antar sesama Muslim maupun dengan penganut agama lain. Ruang kompromi hanya dibuka pada masalah-masalah cabang (*far'iyah*) yang berlandaskan dari dalil yang *zhanni* (bersifat tidak pasti). Kompromi dalam masalah *far'iyah* juga harus dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan dan tidak pada masalah *far'iyah* yang bersifat *mujma' 'alaih* (permasalahan yang sudah terjadi kesepakatan antara para ulama mujtahid dalam menentukan status hukumnya). Adapun masalah *far'iyah* yang bersumber dari dalil yang bersifat *qath'i* (pasti), dan masalah yang bersifat *mujma' 'alaih*, maka Islam tetap tidak membuka ruang untuk berkompromi.

Kompromi permasalahan agama dengan agama lain sama sekali tidak dibuka ruang dalam Islam. Tidak membuka ruang kompromi bukan berarti Islam anti-toleransi. Toleransi dengan agama lain dalam Islam tetap mengacu pada konsep dasar yang telah disebutkan, yaitu pernyataan Allah SWT dalam Alquran surat Al-Kafirun ayat 6. Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa umat Islam wajib beribadah dengan ajaran dalam agamanya, tidak boleh mencampuradukkan dengan agama lain. Dalam dua ayat sebelumnya (ayat

3 dan 5) ditegaskan juga bahwa orang non Muslim tidak boleh beribadah dengan tata cara ibadah orang Muslim.

Dalam hal tidak membolehkan beribadah dengan ajaran agama lain, Islam tetap tidak membolehkan umatnya mencela umat agama lain. Sebagaimana Penegasan Allah dalam Alquran surat Al-An'Am ayat 108, yang artinya: "*dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*" (QS. Al-An'am [6]: 108).

Ayat di atas merupakan larangan tegas umat Islam menghina penganut agama lain. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam merupakan agama *rahmatan lil'alamin*. Tidak mencampuradukkan yang satu dengan yang lain, tapi menerima yang lain, sebatas untuk hidup berdampingan selama yang lain itu tidak menjadi pengganggu. Begitulah konsep toleransi antar agama sebagai prinsip moderasi beragama dalam Islam.

Masyarakat Indonesia perlu diberikan pemahaman yang maksimal tentang prinsip moderasi beragama. Hal ini bertujuan agar mereka tidak tertipu dengan berbagai isu yang tersebar dengan sangat cepat, sehingga tanpa disadari agama dan kepercayaan mereka telah tergadaikan. Literasi budaya dan kewargaan dimaksudkan sebagai faktor pendukung dalam memahami dan mengimplementasikan sikap moderasi beragama.

Moderasi beragama harus tetap berjalan pada porosnya dalam menghadapi perbedaan. Literasi budaya dan kewargaan merupakan batu loncatan untuk menerapkan sikap moderasi beragama setelah dipahami

dengan benar. Dengan kuatnya moderasi beragama di Indonesia dengan dasar pijakan literasi budaya dan kewargaan, secara otomatis persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia akan semakin kuat. Hal itu disebabkan masyarakat semakin sadar akan identitas nasional mereka sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lahir dari perbedaan dan tumbuh dalam bingkai ke-bhinneka-an.

KESIMPULAN

Warga negara Indonesia merupakan warga negara yang heterogen (berbeda-beda). Negara Indonesia adalah negara yang multikultural. Keberagaman adalah anugerah bagi rakyat Indonesia. Indonesia tidak hanya beragam dalam hal budaya, etnis, bahasa dan suku bangsa, akan tetapi juga beragam dalam hal agama. Keberagaman agama di Indonesia tidak menjadi hambatan bagi penduduknya untuk tetap hidup dalam kerukunan. Warga negara Indonesia hanya perlu memadukan keberagaman tersebut agar menjadi suatu keindahan. Literasi budaya dan kewargaan pada

era revolusi industri 4.0 merupakan batu loncatan menuju kunci utama dalam membentuk kerukunan dalam perbedaan.

Kunci utama itu adalah moderasi beragama. Moderasi beragama dalam Islam diatur dengan prinsip keadilan, keseimbangan dan toleransi. Moderasi beragama tidak membuka ruang kompromi dalam hal *ushuluddin*, *mas'alah far'iyah* yang bersumber dari dalil yang *qath'i* dan *mas'alah far'iyah* yang *mujma' 'alaih*. Moderasi beragama dalam Islam juga tidak membenarkan umat Islam mencela apalagi menyakiti penganut agama lain. Hal ini menjadi pertanda bahwa Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*.

Dengan menggunakan literasi budaya dan kewargaan pada era revolusi industri 4.0 sebagai batu loncatan dalam membentuk sikap moderasi beragama, warga negara Indonesia akan semakin sadar terhadap identitas nasionalnya sebagai warga negara yang hidup dalam perbedaan, sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika semakin terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhsan Na'im, Hendry Saputra. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia; Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Al-Zuhaili, W. (2001). *al-Tafsir al-Wasith*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Anggi Pratiwi, E. N. (2019). Implementasi Literasi Budaya dan Kewargaan Sebagai Solusi Disinformasi pada Generasi Millennial di Indonesia. *Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 72-73.
- Farah Diena, Andi Tarigan. (2019). *Revolusi Industri Keempat oleh Klaus Schwab*. Jakarta: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA.
- Fauzi, A. (2018). Moderasi Islam, untuk Peradaban dan Kemanusiaan. *Jurnal Islam Nusantara*, 232-244.

- Firman, Ratna Djumal, dkk. (2017). *Materi Pendukung; Literasi Budaya dan Kewargaan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Fonna, N. (2019). *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. Medan: Guepedia.com.
- Halim, S. (2018). *Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*. Bandung: Medium.
- Halim, I. A. (2020). Religion Motivation In Arisan Tradition Betawi Community Motivasi Agama Dalam Tradisi Arisan di Masyarakat Betawi, *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(2), 100-121.
- Kementrian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Lase, D. (2019). Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. *SUNDERMANN*, 31.
- Mohamad Fahri, Ahmad Zainuri. (2020). Moderasi Beragama di Indonesia. *INTIZAR*, 95-100.
- Mutiarawati Fajariah, Djoko Suryo. (2020). Sejarah Revolusi Industri di Inggris pada Tahun 1760-1830. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 77-94.
- Siregar, A. A. (2020). Prinsip-prinsip Moderasi dalam Islam. In A. N. Abdullah Munir, & Sirajuddin (Ed.), *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia* (I ed., Vol. 1, pp. 32-41). Bengkulu, Bengkulu, Indonesia: CV. ZIGIE UTAMA.